

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA & LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan pustaka

Untuk membantu peneliti dalam mengembangkan penelitian yang dilakukan, maka perlu adanya hasil penelitian sebelumnya. Oleh sebab itu peneliti telah menelaah beberapa hasil ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian peneliti. Berikut ini beberapa hasil penelitian yang menjadi dasar penelitian peneliti.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Chaerowati (2018) dengan judul “Mengembangkan Radio Komunitas untuk Mengangkat Ekonomi Kreatif Masyarakat Pedesaan”. Penelitian ini dilakukan pada radio komunitas Ruyuk tepatnya di Desa Mandalamekar Kecamatan Jatiwaras Kabupaten tasikmalaya. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat potensi bagi radio komunitas Ruyuk untuk mengembangkan ekonomi kreatif masyarakat pedesaan tanpa merusak lingkungan. Ruyuk, menjadi media informasi bagi komunitasnya, untuk itu dapat diharapkan membantu dengan berbagai program baik *on-air* maupun *off-air* dengan tujuan mendorong ekonomi kreatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa radio komunitas Ruyuk dapat memberikan akses informasi, membangun demokrasi dan memakmurkan masyarakat Desa Mandalamekar. Pada pembuatan program, Ruyuk melibatkan masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi atau menjadi aktor utama dalam pembahasannya. Terdapat dampak positif dari

apa yang dilakukan oleh Ruyuk, seperti menguatnya partisipasi masyarakat, tumbuhnya rasa optimis masyarakat untuk maju, serta menciptakan bentuk transformasi dari para petani tradisional menjadi petani wirausahawan.

Pada penelitian yang dilakukan Chaerowati (2018), lebih memfokuskan kepada partisipasi anggota komunitasnya, untuk itu teori yang digunakan adalah *Development Theories* dari Pant, S (2009). Untuk mendapatkan data penelitian, chaerowati menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengambilan data dengan cara wawancara pengelola dan penyiar Ruyuk serta tidak lupa Kepala Desa Mandalamekar. Observasi dilakukan dengan cara mengamati dan mencermati kegiatan masyarakat beserta Ruyuk. Studi dokumen tidak lupa untuk dilakukan, dengan cara menganalisis dokumen yang berkaitan dengan Ruyuk dan Desa Mandalamekar.

Kedua, penelitian dari Al-hassan et al (2011) dengan judul “*The Role of Community Radio in Livelihood Improvement: The Case of Simli Radio*”. Penelitian ini dilakukan di Distrik Tolon-Kumbungu di Wilayah Utara Negara Ghana dengan objek radio komunitas bernama Simli. Pendirian radio komunitas ini di bawahi oleh NGO bernama Ghanaian Danish Community Program (GDCCP). Fokus GDCCP terkait dengan pembangunan perdesaan terintegrasi seperti pada mempromosikan masalah pertanian, kesetaraan gender, pendidikan, perdagangan, cuaca, bencana alam, kemiskinan dan masalah sosial.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis tantangan yang ada pada radio Simli serta menyimpulkan dampak pada masyarakat dari kehadirannya. Hasil dari penelitian ini bahwa Simli telah menjalankan tugasnya sebagai media informasi yang menyuarakan masyarakat yang miskin akan informasi. Dengan berbagai programnya, Simli mampu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan solusi pada masalah pembangunan masyarakat seperti pada fokus program yang digagas oleh GDCP. Simli pun memfasilitasi tatap muka antara pemerintah lokal dan masyarakat petani. Hal ini berdampak pada meningkatnya penjualan dan pendapatan karena menciptakan peluang pasar bagi operator usaha kecil dan menengah. Untuk itu, penting disadari bahwa umpan balik yang diberikan oleh masyarakat dapat memberikan dampak yang cukup signifikan bagi masyarakat pedesaan yang telah diabaikan.

Penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan partisipatif yang melibatkan studi pustaka dari penelitian sebelumnya. Observasi dilakukan untuk melihat para anggota Simli berpartisipasi dalam program pembangunan pedesaan. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain multi-kasus. Penelitian dilakukan pada 12 dari 518 komunitas yang dipilih berdasarkan lima faktor seperti *pertama*, komunitas yang menyelenggarakan proyek yang relevan. *kedua*, ukuran komunitas dari jumlah populasi. *Ketiga*, komunitas yang dianggap baru bergabung atau yang sudah lama. Kemudian dua faktor lainnya dilihat dari ketersediaan pusat satelit dan aksesibilitas transportasi. Sampel komunitas diambil dari dua distrik Tolon-kumbungu dan Savelugu-Nanton yang mengikuti

program GDGP. Secara khusus penelitian ini mengumpulkan data berdasarkan penyiaran sebagai alat pendidikan, mempromosikan budaya tradisional, untuk berbagi informasi terhadap komunitas, memberikan hiburan dan promosi melalui diskusi kelompok komunitas.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Manyozo et al (2012) dengan judul “*Models of and approaches to the station management of six african community radio broadcasters*”. Pada artikel ini membahas tentang manajemen radio komunitas di tiga wilayah negara afrika, yaitu Mali, Mozambik dan Uganda. Inti dari pembahasan artikel ini menjelaskan tentang bagaimana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) diterapkan oleh para komite manajemen radio komunitas. Tujuan dalam penelitian ini untuk membandingkan praktik radio komunitas semi-perkotaan yang memiliki akses penggunaan TIK lebih baik dan radio komunitas yang berada di pedesaan dengan akses yang terbatas. Teori yang digunakan terfokus pada ekonomi politik komunikasi dari Graham (2005) dan Manell (2004).

Terdapat empat peran manajemen radio komunitas yang dapat diidentifikasi dari penelitian ini. *Pertama*, Komite manajemen radio komunitas dapat menjaga kelembagaan stasiun radio. *Kedua*, dapat secara aktif berperan mendapatkan penghasilan untuk stasiun. *Ketiga*, dapat meningkatkan kapasitas dan investasi melalui pemberdayaan masyarakat. *Keempat*, mengelola sumber daya manusia dan telekomunikasi stasiun. Untuk mendapatkan jawaban, Manyozo et al (2012) menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan diskusi terfokus bersama jurnalis, pengelola radio komunitas dan pembuat kebijakan di Mali, Mozambik dan Uganda. Komunitas Penyiar yang dipilih

adalah Fanaka dan Welena (Mali) kemudian dari Gorongosa, Dondo dan Gesom (Mozambik) dan yang terakhir Kagadi kibaale dan Buddu (Uganda).

Dalam penemuannya menunjukkan, bahwa tidak adanya bukti yang jelas dengan pengaruh TIK terhadap cara kerja manajemen radio komunitas. Hal ini didasari oleh para pengelola yang secara sadar memanfaatkan telepon seluler, komputer atau internet, akan tetapi hal ini tidak berpengaruh signifikan terhadap cara mereka bekerja. Oleh sebab itu, kesenjangan digital dalam konvergensi radio komunitas tidak memiliki dampak yang cukup berarti bagi tingkat manajerial. Akan tetapi, dengan kehadiran TIK yang ada, dapat menumbuhkan interaksi yang terus berkembang pada tingkat anggota komite atau asosiasi manajemen.

Ketiga penelitian tersebut menjadi sangat penting bagi peneliti untuk melihat lebih luas terkait manajemen radio komunitas yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu dari ketiga penelitian di atas menjadi rujukan peneliti untuk bahan penelitian yang dilakukan. Dari ketiga penelitian tersebut, adapun yang cukup membedakan dengan fokus yang diteliti yaitu dari objek penelitian yang dapat menghasilkan data berebda.

Oleh sebab itu, pada penelitian yang diteliti oleh peneliti dengan judul “*Pengelolaan Hanacaraka FM sebagai Radio Komunitas untuk Pemberdayaan Lingkungan Masyarakat Wonosari*” dengan objek Hanacaraka FM. Radio Komunitas Hanacaraka FM berada di alamat Jl. Taman Bakti, Jeruksari, Wonosari, Kec. Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul,

Daerah Istimewa Yogyakarta 55851. Untuk mendapatkan data yang mendukung dalam penelitian, peneliti telah melakukan eksplorasi pengelolaan Hanacaraka FM dalam isu pembangunan dan pemberdayaan pada masyarakat Wonosari. Peneliti akan menggunakan teori komunikasi pembangunan dari McPhail (2009) sebagai landasan kemudian radio komunitas dari Raghunath (2020) dan manajemen radio komunitas dari Darmanto et al (2015). Peneliti menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan metode studi kasus sehingga mendapatkan hasil yang lebih mendalam dari fenomena yang terjadi terkait isu lingkungan. Dalam teknik mengumpulkan data, peneliti melakukan observasi, wawancara dan Beberapa data sekunder yang peneliti dapatkan dari narasumber misalnya saja foto-foto kegiatan lama yang penting dan berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu juga artikel-artikel pada internet dan juga laman resmi Hanacaraka FM merupakan data-data sekunder yang dapat peneliti kumpulkan untuk memperkaya data.

Dapat ditarik kesimpulan dari ketiga penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan dari mulai objek penelitian hingga teori yang digunakan. Dari ketiga penelitian diatas yang cukup signifikan perbedaannya adalah teori yang akan diangkat oleh peneliti. Bila (Chaerowati, 2018) lebih terfokus pada teori Development Theories dari Pant, S (2009), kemudian (Al-hassan et al., 2011) menggunakan teori participatory communication dari DragonA (2001) dan (Manyozo et al., 2012) menggunakan teori Political Economy dari Graham (2005) dan Manell (2004). Peneliti akan menggunakan teori radio komunitas dari (Raghunath, 2020) dan manajemen

radio komunitas dari (Darmanto et al., 2015). Adapun peneliti belum menemukan hasil dari penelitian di radio Hanacaraka FM sebagai media pemberdayaan. Pada dasarnya komunikasi pembangunan akan melibatkan masyarakat sebagai subjek yang dapat berdaya untuk memenuhi kebutuhan informasinya. Oleh sebab itu penting bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini untuk berkembangnya radio komunitas sebagai media pemberdayaan.

2.2. Landasan Teori

2. 2. 1. Pembangunan Berkelanjutan

Menurut WCED (dalam Godemann, 2011) menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan tujuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang. Hal tersebut didasari pada perkembangan sosial yang terjadi di masyarakat. Terdapat tiga pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan yang harus berjalan beriringan (Rahadian, 2016).

Perkembangan ini dapat dilihat menjadi tiga bagian yang saling berhubungan antara manusia dan lingkungannya. Menurut Godemann (2011) pertama, terdapat peningkatan ekonomi yang secara global meningkat semakin tinggi melalui arus barang, uang, dan informasi. Kedua, terjadinya perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati. Hal tersebut dapat dilihat dari kelangkaan air, banjir, kerusakan hutan, kelaparan, penyakit serta pada aspek lingkungan seperti polusi, limbah, kebisingan lalu lintas dan hilangnya kesuburan tanah. Ketiga, terdapat peningkatan pada aspek teknologi informasi dan komunikasi modern yang berpengaruh terhadap kesenjangan di dunia dan lokal. Kesenjangan tersebut

menyebabkan distorsi ekonomi, ekologi, sosial dan budaya yang sangat parah (Godemann, 2011).

Konsep pembangunan berkelanjutan memiliki interpretasi yang berbeda pada setiap visi sosialnya seperti keadilan, hidup sederhana, partisipasi, kesejahteraan manusia, tanggung jawab untuk masa depan, kebebasan dan penentuan nasib sendiri (Godemann, 2011). Hal tersebut merupakan konsep normative yang mengacu pada bentuk ekonomi dan gaya hidup yang tidak membahayakan masa depan. Menurut Rosana (2018) bahwa lingkungan yang lestari diharapkan mampu untuk menopang keberlangsungan kehidupan manusia.

Pembangunan berkelanjutan memiliki fokus pada hubungan manusia dan lingkungan sehingga dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini hingga yang akan datang (Godemann, 2011). Menurut Rosana (2018) menjelaskan bahwa perlu ada upaya yang dilakukan oleh manusia dalam menjaga lingkungan hidup demi menghindari kepunahan umat manusia. Tujuan dalam pembangunan berkelanjutan sesuai dengan Laporan Sekjen PBB (dalam Rahadian, 2016) menjelaskan bahwa terdapat delapan poin penting seperti memerangi kemiskinan, mengubah pola konsumsi, mempromosikan manusia yang berkelanjutan pembangunan permukiman, keanekaragaman hayati dan hutan, lautan, sumber daya air, memajukan ketahanan pangan, dan sumber energi termasuk dari yang terbarukan. Adanya bentuk partisipasi yang dilakukan oleh manusia untuk lingkungan menjadi visi yang sangat penting bagi keberlanjutan (Godemann, 2011).

Strategi yang dapat dilakukan dalam pembangunan berkelanjutan menurut Rahadian (2016) yaitu pembangunan untuk menjamin pemerataan dan keadilan sosial, pembangunan yang tetap menjaga keanekaragaman, pada proses pendekatan dapat dilakukan dengan cara integratif, dan proses pembangunan harus memiliki perspektif dengan waktu jangka panjang.

2. 2. 1. 1. Partisipasi Masyarakat

Patemans (dalam Carpentier, 2016) merumuskan dua definisi partisipasi yang pertama adalah partisipasi parsial dan penuh. Partisipasi parsial sebagai sebagai suatu proses di mana dua atau lebih pihak saling mempengaruhi dalam pengambilan keputusan tetapi kekuatan akhir dalam memutuskan terdapat di satu pihak saja. Sementara, partisipasi penuh dilihat sebagai sebuah proses pada setiap anggota individu dari badan pembuat keputusan, memiliki kekuatan yang sama dalam menentukan hasil keputusan.

Partisipasi publik dan pemangku kepentingan dalam perencanaan lingkungan sering diasumsikan untuk meningkatkan efektivitas melalui peningkatan kualitas lingkungan (Drazkiewicz et al., 2015). Partisipasi menjadi penting dalam masyarakat demokratis yang populasinya lebih beragam secara sosial dan budaya. Terciptanya partisipasi membuat perubahan yang cukup menantang bagi komunitas untuk mengembangkan kapasitas mereka (Checkoway, 2011).

Radio Komunitas sebagai media yang memiliki peranan penting untuk terciptanya partisipasi masyarakat, perlu memiliki kekreatifitasan dalam membuat program acara. Menurut Godemann (2011), media melalui program acara yang dibuat dengan menyiarkan

di arena publik, dapat berdampak pada partisipasi yang dilakukan sejumlah kelompok sosial yang berbeda. Dengan adanya bentuk partisipasi menjadikan alasan untuk sebagian orang melakukan sebuah perbuatan (Yasril & Nur, 2017). Akan tetapi pada beberapa kasus, publik tidak dapat ikut terlibat di karenakan kurangnya kemampuan memahami yang dimiliki sehingga akses terbatas pada informasi yang dibutuhkannya (Drazkiewicz et al., 2015).

2. 2. 1. 2. Pemberdayaan

Menurut Ramos & Prideaux (dalam Fitriana, 2020) menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah proses untuk menggambarkan sarana yang dimiliki individu atau kelompok dalam memperoleh kekuasaan, akses ke sumber daya dan keuntungan kontrol atas hidup mereka. Artinya pemberdayaan telah dianggap sebagai proses kolaboratif dimana orang yang kurang berdaya dapat meningkatkan akses dan kontrol atas sumber daya untuk bertujuan memecahkan masalah pribadi atau masyarakat. Pemberdayaan menjadi sangat penting bila berdasarkan pada asumsi yang dimana masyarakat termarginalkan yang disebabkan oleh ketidakberdayaan (Ulum & Anggaini, 2020).

Makna dalam pemberdayaan, sangat melekat pada meningkatnya kekuasaan, proses kekuasaan, pengalokasian kekuasaan dan cara untuk mampu berkuasa. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dari Suharto (dalam Mulyawan, 2016) yang melihat pemberdayaan adalah proses dan tujuan.:

- A. Sebagai bentuk proses, pemberdayaan menjadi rangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau kelompok lemah yang termarjinalkan mampu berdaya terutama kelompok miskin.
- B. Sebagai tujuan pemberdayaan, maka garis akhirnya adalah perubahan sosial untuk masyarakat yang berdaya, memiliki kemampuan dan pengetahuan, untuk memenuhi kebutuhan seperti ekonomi dan sosial.

Dengan demikian, konsep pemberdayaan lebih kepada masyarakat dan pembangunan untuk lebih berdaya bagi dirinya. Pendekatan yang paling mendasar pada pemberdayaan adalah pandangan masyarakat sebagai subjek dari pembangunan sendiri dan bukan dijadikan objek dari berbagai proyek pembangun. Kesuksesan dilihat dari kepuasan yang diberikan masyarakat bukan dari pemerintah. Pemberdayaan dapat dijadikan kekuatan bagi pembangunan ekonomi di suatu daerah dan wilayah karena masyarakat mendapatkan sesuatu yang mereka butuhkan dengan konteks lokalnya.

Terdapat dampak yang positif dari komunitas yang berdaya, menurut Fitriana (2020) bahwa dampak positif yang didapat dari pemberdayaan adalah masyarakat mampu bertanggung jawab terhadap pekerjaan mereka. Masyarakat memiliki kapasitas untuk perubahan sosial di masa depan melalui pengambilan keputusan dan aksi tertentu (Ulum & Anggainsi, 2020).

Dapat diambil contoh dari segi pembangunan baik lingkungan atau kemampuan individu yang didasari keinginan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dapat disebut sebagai pemberdayaan. Secara umum, bahwa masyarakat yang diberdayakan memiliki kemampuan untuk mengubah masa depan dengan bentuk keterlibatannya dalam pengawasan atau kontrol terhadap sumber daya yang dimiliki Soetomo (dalam Ulum & Anggainsi, 2020).

Dalam rangka pemberdayaan, setiap orang perlu kebebasan, pilihan, dan ruang lingkup untuk mengambil risiko pada setiap keputusannya bagi dirinya agar dapat belajar dan aktualisasi diri mampu diapresiasi (Ulum & Anggainsi, 2020). Menurut Fitriana (2020) bahwa pemberdayaan masyarakat, dalam pelaksanaannya melibatkan masyarakat yang menjadi aktor utama dalam setiap kegiatan yang dilakukan.

Perlu kesadaran dari masyarakat untuk berdaya bagi dirinya yang berdampak pada kemandirian. Kemandirian masyarakat adalah kondisi dimana masyarakat merasakan tanda dalam kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan kemampuannya sendiri (Fitriana, 2020).

2. 2. 2. Komunikasi Pembangunan

Menurut McPhail (2009) komunikasi pembangunan adalah proses intervensi dengan cara yang sistematis atau strategis dengan media (cetak, radio, telepon, video dan internet), atau pendidikan (pelatihan, kawicaksanaan, pendidikan) untuk perubahan sosial yang positif.

Perubahan itu dapat berupa ekonomi, pribadi seperti dalam hal rohani, sosial, budaya, atau politik.

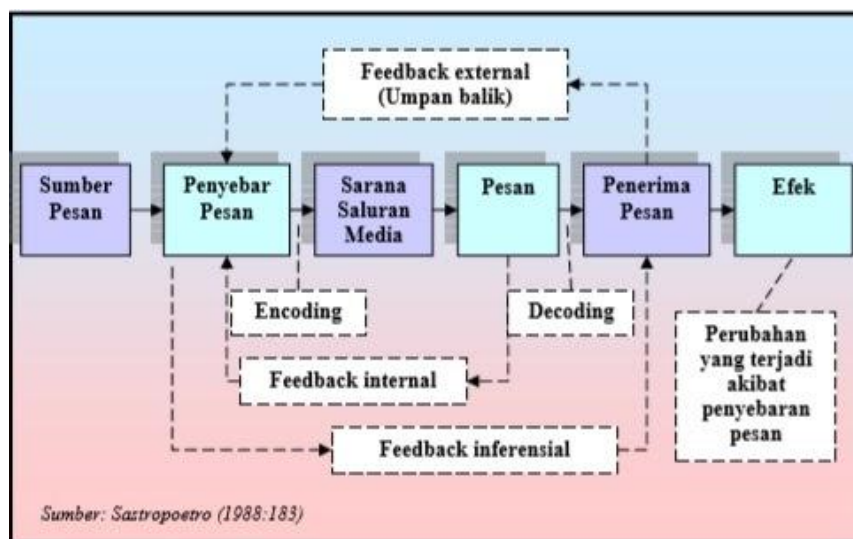
Terdapat beberapa tahapan untuk komunikasi pembangunan dalam mencapai modernisasi sehingga memerlukan sikap baru, kebiasaan kerja baru, model ekonomi progresif, kebijakan publik, dan semua ini harus disampaikan dengan penerapan pesan pada media massa. Bila melihat definisi mengenai komunikasi pembangunan yang dirumuskan oleh McPhail (2009) bahwa Informasi dari media, khususnya radio, membantu penduduk setempat untuk mempelajari gagasan dan praktek baru.

Pada dasarnya, komunikasi pembangunan bertujuan untuk mendorong masyarakat dengan cara mengajak dan mendidik untuk melakukan perubahan yang telah direncanakan. Menurut Mardikanto (2010) bahwa komunikasi pembangunan mampu memerankan sebagai:

1. Menyebarkan informasi dari hulu hingga ke hilir dengan sumber seperti peneliti, pusat informasi dan penentu kebijakan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan informasi. Sebaliknya, masyarakat atau praktisi mampu memberikan umpan balik terhadap informasi/inovasi tersebut.
2. Komunikasi pembangunan dapat berperan sebagai pemecah masalah dengan cara menjadi perantara informasi atas masalah yang dihadapi masyarakat, praktisi, pengguna atau pelanggan produk tertentu kepada sumber terkait atau penentu kebijakan.

3. Pengambilan keputusan, yaitu sebagai fasilitator informasi atas kebijakan pembangunan dari penguasa kepada masyarakat atau sebagai perantara informasi dari masyarakat tentang kebijakan yang harus diputuskan oleh pihak luar (bukan masyarakat).

Dapat diartikan bahwa komunikasi pembangunan adalah proses penyebaran informasi melalui media massa. Pihak yang terlibat dalam pembangunan seperti pemerintah, masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang dapat diterima secara bersamaan agar masyarakat dapat memiliki kesadaran dalam partisipasi untuk terlibat usaha pembangunan.



Gambar 1. Proses Komunikasi Pembangunan

Sumber: Sastropoetro (dalam Mahmud, 2007)

Bila diuraikan gambar di atas maka dalam proses komunikasi pembangunan, komunikator sebagai pemilik ide/gagasan seperti pemerintah dapat menjadi sumber pesan. Pesan tersebut disebarkan dengan menggunakan media yang bertujuan memiliki efek bagi penerima pesan. Dalam proses tersebut, dapat terjadinya umpan balik dari komunikan ke komunikator sebagai bentuk reaksi atas pesan-pesan pembangunan yang telah tersampaikan.

Pola komunikasi di masyarakat dapat dilakukan dengan mengidentifikasi: bagaimana penyebaran informasi di masyarakat, siapa yang menjadi sumber informasi, di mana pusat-pusat penyebaran informasi, dan saluran komunikasi apa yang dipergunakan Sastropoetro (dalam Mahmud, 2007). Terdapat dua perspektif model mengenai komunikasi pembangunan menurut McPhail (2009), yaitu perspektif difusi yang satu arah, hirarkis, pandangan yang sudah direncanakan dari proses komunikasi dan pengembangan, kemudian perspektif partisipasi yang mengadopsi pandangan dua arah dalam pengelolaan diri.

2. 2. 3. Komunitas dan Radio Komunitas

komunitas adalah kelompok yang saling berinteraksi dan saling mendukung satu sama lain, dengan dibatasi oleh pengalaman dan karakteristik yang berbeda untuk saling melengkapi (Cobigo et al., 2016). Merujuk dengan pernyataan diatas maka komunitas adalah organisme yang memiliki kesamaan dalam sudut pandang sehingga apa yang dilakukan dapat seragam.

Ketika komunitas memerlukan media, maka akan menggunakan radio sebagai wadah untuk saling berinteraksi. Menurut Tripambudi (2011) alasan utama komunitas memilih

radio adalah biaya pendirian dan operasional lebih murah dibandingkan dengan media lainnya. Hal tersebut mendasari komunitas untuk memilih media radio komunitas. Media radio pun merupakan media massa yang murah dan terjangkau oleh masyarakat, tidak seperti media lainnya radio memberikan akses lebih mudah sekalipun oleh orang yang tidak dapat membaca huruf.

Tidak ada definisi khusus terkait radio komunitas di Indonesia, selain berdasarkan Undang-Undang Penyiaran No.32 Tahun 2002 (pasal 21, Butir 1) yang menyebutkan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) adalah Lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia. Didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial. Dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya. Radio komunitas sering disebut juga sebagai radio sosial, pedesaan, pendidikan dan alternatif. Hal tersebut didasari karena otonomi, identitas, dan heterogenitas budaya yang dapat berekspresi secara bebas untuk suatu wilayahnya (Raghunath, 2020).

Menurut Raghunath (2020) menjelaskan bahwa definisi tentang radio komunitas tergantung bagaimana komunitas memiliki titik asal, tujuan dan fungsi yang dijalankan, untuk itu radio komunitas tidak memiliki definisi yang pasti karena mencerminkan keragaman. Adapun radio komunitas diartikan sebagai media yang menawarkan alternatif siaran yang dibutuhkan oleh komunitasnya atau masyarakat luas, bukan berdasarkan keinginan pasar atau individu yang memiliki kepentingan (Eddyono, 2012). Pada perbedaan

tersebut terdapat hal yang dapat diamati dalam radio komunitas adalah karakteristik dan pola yang luas. Radio komunitas memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan radio publik dan swasta.

Kevin Howley (dalam Raghunath, 2020) menguraikan karakteristik radio komunitas yang beragam. *pertama*, nirlaba atau organisasi yang memiliki satu tujuan atau mendukung yang berkaitan dengan isu publik akan tetapi bersifat tidak komersial. *Kedua*, melayani komunitas tertentu. *Ketiga* dikelola dan dimiliki oleh masyarakat. *Keempat*, editorial independen yang tidak memiliki pengaruh dari pemerintah atau negara. *Kelima*, mempromosikan hak berkomunikasi agar lebih bebas. Dengan demikian, radio komunitas adalah sebuah wahana komunikasi milik masyarakat, dari masyarakat dan oleh masyarakat yang potensial untuk melayani kepentingan masyarakat. Peranan penting radio komunitas pun sebagai sarana pendidikan, hiburan dan informasi, sehingga memiliki fungsi untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal dengan setiap program nya (Tripambudi, 2011).

Berdasarkan pernyataan tersebut maka radio komunitas adalah tempat untuk bersosial dengan memiliki sudut pandang yang sama terhadap suatu masalah dan tidak terlibat dalam kepentingan komersial maupun publik yang luas. Dengan terbukanya akses informasi dan teknologi yang semakin berkembang pada radio komunitas, mampu menumbuhkan keinginan dan kesempatan masyarakat untuk menggunakan media sebagai pemuas informasi dan menjawab segala kebutuhan komunitasnya (Juditha, 2015).

Radio komunitas pun perlu adanya partisipasi dari para anggotanya untuk mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan informasi demi kepentingan tujuan mereka. Pada awal pendirian, radio komunitas memerlukan persetujuan dari 51% jumlah penduduk dewasa atau 250 orang dengan dikuatkan oleh persetujuan dari aparat pemerintah setingkat kepala desa/lurah setempat (Morissan, 2018). Dengan begitu terdapat perbandingan lain dengan radio swasta dan radio milik negara. Menurut Birowo et al., (2013) perbandingan tersebut dapat dilihat dari:

Partisipasi komunitas

Pada awal pendiriannya, radio komunitas menjadi wadah untuk berbincang, berdiskusi, berkesenian dan menyampaikan pendapat bagi masyarakatnya sehingga mereka dapat ikut campur dari mulai pengelolaan sampai dengan pengawasan radio komunitas. Menurut Banze et al., (2012) partisipasi aktif yang dilakukan masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan radio adalah karakteristik yang mendasar dari radio komunitas.

Menurut Girard (dalam Ch et al., 2016) bahwa radio komunitas tidak hanya ikut berpartisipasi pada masyarakat, melainkan masyarakat pun dapat berpartisipasi dalam radio komunitas di tingkat kepemilikan, manajemen, direktur, finansial dan pemrograman. Selaras dengan hal tersebut, menurut Khan et al., (2017) bahwa partisipasi masyarakat benar-benar memiliki dan mengendalikan stasiun dilihat dari pemilihan anggota dewan, pembuat kebijakan untuk stasiun, manajemen stasiun, pemilihan dan pemrograman untuk

menyediakan konten, memproduksi berbagai program yang mencerminkan masyarakat representasi diluar stasiun radio komunitas.

Menurut Pratiwi (dalam Sa'diyah, 2016) terdapat beberapa faktor untuk terciptanya dukungan partisipasi dari masyarakat. *Pertama*, masyarakat dapat berpartisipasi bilamana isu dan kepentingan aktivitas sejalan dengan kebutuhannya. *Kedua*, masyarakat dapat berpartisipasi aktif bagaimana tindakannya akan membawa perubahan, khususnya pada rumah tangga atau individu. *Ketiga*, segala perbedaan bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat perlu dihargai dan diakui oleh anggota lainnya. *Keempat*, setiap orang dapat dimungkinkan berpartisipasi dan mendapat dukungan dari masyarakat lainnya. *Kelima*, struktur dan proses partisipasi tidak bersifat menjauhkan.

Terdapat faktor yang mempengaruhi masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi. Masyarakat akan lebih sukarela berpartisipasi bilamana sambutan yang diberikan oleh pengelola positif dan setiap kegiatan dapat menguntungkan bagi mereka (Sa'diyah, 2016). Partisipasi masyarakat dapat saling menguntungkan bagi pihak radio komunitas. Dengan ikut berpartisipasinya masyarakat mampu mengembangkan solusi untuk memecahkan persoalan kehidupannya, dengan berperan aktif mengikuti dialog yang dibuat oleh para pengelola sehingga dapat membangun keterampilan dan kapasitas bagi dirinya sendiri (Chaerowati, 2018).

Kejelasan komunitasnya

Berdirinya radio komunitas bertempat di wilayah tertentu, dengan media untuk kepentingan masyarakatnya sehingga memiliki khalayak yang lebih jelas untuk dituju. Isi siaran radio komunitas terfokus pada melayani kepentingan komunitas serta isi siaran sangat populer dan relevan dengan konteks lokalnya (Al-hassan et al., 2011). Radio komunitas akan sangat jelas bilamana pengelolaannya tidak melibatkan kekuasaan, kekayaan atau piawai dalam pertarungan ideologis didalamnya. Perlu disadari radio komunitas dikelola oleh komunitas untuk memenuhi segala kebutuhan informasi komunitas pada wilayah tertentu (Eddyono, 2012).

Wilayah cakupan terbatas

Dengan terbatasnya daya jangkau 2,5 Km jaringan radio komunitas membuat mereka hanya terfokus pada anggotanya, akan tetapi bila jangkauannya semakin luas akan ragu untuk mendapatkan partisipasi dari komunitasnya. Oleh sebab itu jangkauan daya pancar harus melihat peluang perluasan partisipasi komunitas dalam aspek pengelolaan.

Kehadiran radio komunitas memiliki dasar untuk melayani masyarakat yang berada di wilayah tersebut dengan memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan daya cakupannya (Aminah, 2016). Kehadiran radio komunitas dapat dilihat dari seberapa penting radio komunitas bagi wilayah tersebut. Perlu ada jaminan untuk berdirinya radio komunitas pada lingkup geografis tertentu karena perlu keaktifan dari para anggota untuk pengelolaannya (Panuju, 2018).

Kedekatan dengan situasi lokal

Sebagai media di wilayah yang kecil, menjadikan radio komunitas mampu mendukung isi siaran lokal untuk tetap bertahan dan berkembang dengan program sosial-budaya. Oleh karena itu, isu pembahasan dapat dilakukan dengan saling berbagi ide dan bertukar pikiran karena memiliki kesamaan tujuan sehingga mampu mengatasi persoalan bersama. Dengan kekuatan konten lokalnya, radio komunitas dapat menuntut warga atau komunitasnya untuk berperan aktif mengangkat potensi yang didasari pada nilai-nilai lokal di berbagai aspek kehidupan (Bagus & Novayanti, 2019).

Teknologi dan biaya terjangkau

Dengan memiliki daya jangkau yang terbatas membuat radio komunitas tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar seperti radio swasta pada umumnya. Hanya dengan peralatan sederhana yang dapat memberikan manfaat bagi komunitasnya, maka yang terpenting mampu menyerap partisipasi masyarakat di wilayahnya. Alasan inilah komunitas memilih radio, karena biaya pendirian dan operasional lebih murah dibandingkan dengan media lainnya (Tripambudi, 2011).

Dari, oleh, untuk dan tentang komunitasnya

Dengan segala karakteristik radio komunitas yang terpenting dapat melayani kebutuhan komunitasnya sebagai pokok tujuan pembahasan. Mulai dari komunitas, oleh komunitas, untuk komunitas, dan tentang komunitasnya. Oleh sebab itu, isi informasinya

ditentukan oleh komunitas tersebut dalam upaya kepentingan bersama. Keterlibatan warga menjadi ciri tersendiri untuk melihat prinsip dasar ini, warga mampu memanfaatkan radio komunitas untuk memenuhi kebutuhan informasinya sehingga secara sadar terlibat langsung untuk mengelolanya (Eddyono, 2012).

Bila melihat pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa radio komunitas memiliki beberapa kegunaan seperti: mendukung dan memfasilitasi budaya lokal; membangun diskusi sesuai kebutuhan komunitasnya; membuat program yang berlandaskan tujuan dibentuknya radio komunitas; memberikan informasi untuk terciptanya pembangunan sosial; menjadi tempat untuk berpartisipasi komunitasnya; memberikan kesempatan bagi siapapun untuk bersuara sesuai tujuan komunitasnya; dan dapat memberikan kontribusi untuk menyediakan SDM untuk industri penyiaran. Menurut Birowo et al., (2013) Radio komunitas memiliki peran penting bagi masyarakat di wilayah terbatas antara lain:

Promosi Asas Keterbukaan

Dalam proses keterbukaan informasi kepada masyarakat, radio komunitas dapat menjadi saluran penting untuk memantau rapat para eksekutif desa, sehingga masyarakat dapat memberikan masukan dan komentar melalui Radio komunitas secara langsung disiarkan. Acara ini diyakini dapat mengurangi risiko para eksekutif desa untuk “bermain” dan akan lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan karena dipantau terus oleh masyarakat desa yang mendengar. Menurut Happer & Philo (2013), media (radio komunitas)

dapat memberikan informasi apa yang terjadi, baik dari dalam atau luar lingkungannya. Masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman dapat langsung mengambil sikap atas isu yang dirasa penting bagi dirinya.

Promosi Transparansi Pejabat Lokal

Radio komunitas dapat menyiarkan pidato kepala desa mengenai pembangunan wilayahnya, sehingga masyarakat dapat mengetahui kinerja kepala desa dalam memenuhi kebutuhannya. Masyarakat desa pun dapat memberikan komentar secara langsung melalui Radio komunitas tersebut. Radio komunitas pun dapat menjadi alat bagi komunikasi politik yang positif dengan tidak dicampurkan pada kepentingan kelompok atau individu. Radio komunitas dapat dijadikan sebagai media sosialisasi politik yang dapat dengan mudah dimanfaatkan dan dinikmati oleh masyarakat, khususnya anak muda yang masih belum paham akan politik (Novadila et al., 2019).

Promosi Demokratisasi dan Transparansi Desa

Radio komunitas menjadi pengingat janji-janji kepala desa seperti dalam visi dan misinya ketika gelar kampanye, dalam hal ini selain memberikan informasi kepada masyarakat mengenai program-programnya dapat juga mencatat apa saja program pembangunan yang menguntungkan bagi masyarakat, sehingga bilamana kepala desa atau pejabat yang terpilih melenceng dari visi dan misinya saat kampanye, radio komunitas dapat menjadi pengingat dan memegang kontrol bagi masyarakat. Hal tersebut menjadikan peranan

radio komunitas menjadi sangat penting bagi masyarakat. Radio komunitas yang diproduksi, dikendalikan dan dimiliki oleh masyarakat dapat memberikan ruang bagi mereka yang “kemiskinan suara” (Pavarala, 2019)

Promosi Transparansi dan Gerakan Ekonomi Lokal

Radio komunitas menjadi media yang mampu mengembangkan ekonomi lokal melalui siarannya, sehingga produk lokal dapat memiliki omset yang lebih tinggi dibanding ketika tidak diketahui oleh masyarakatnya. Melalui radio komunitas pun masyarakat dapat mempercayai sebuah koperasi desa, karena dalam setiap perkembangannya selalu disiarkan dan dapat diketahui masyarakat, dengan begitu kepercayaan masyarakat terhadap produk atau koperasi semakin besar. Radio komunitas dapat menjadi salah satu bentuk ekonomi kreatif lokal dengan memanfaatkan pemikiran, kreativitas dan inovasi dari masyarakat. Hadirnya radio komunitas pun dapat membangkitkan kesadaran masyarakat untuk lebih peduli pada kemampuan untuk membangun lingkungannya sendiri (Chaerowati, 2018).

Advokasi Kebijakan

Keingintahuan masyarakat terhadap kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam aspek pembangunan wilayahnya sangat dinantikan, bahkan radio komunitas dapat menjadi saluran penghubung masyarakat kepada pemerintah untuk mengetahui lebih spesifik rencana pembangunan yang akan dilakukan. Dalam hal ini Radio komunitas pun dapat merangsang kesadaran warga untuk masalah penting tentang permasalahan - permasalahan

publik yang akan menyangkut masa depan mereka. Radio komunitas dapat mengkomunikasikan gagasan dan keterampilan pada anggota komunitasnya, untuk lebih efektif dalam kebijakan pembangunan bagi dirinya (Atika & Rusli, 2015)

Promosi Budaya Lokal

Radio komunitas dapat menjadi media promosi budaya lokal, bahkan dapat menggugah keingintahuan yang lebih dalam untuk generasi muda terhadap budaya di wilayahnya. Radio komunitas pun dapat menjadi wadah bagi pelaku seni atau yang memiliki kemampuan dalam bidang budaya, untuk dapat tetap eksis didengar oleh warga setempat sehingga budayanya tidak cepat luntur tergerus oleh waktu dan dapat dilestarikan. Menurut radio komunitas dapat menjadi penjaga budaya dan estetika lokal, keragaman bahasa, dan bentuk ekspresi untuk melawan kecenderungan budaya dari luar yang berindikasi dapat merubah atau menghilangkan budaya lokal (Raghunath, 2020).

Kontrol Pembangunan desa

Radio komunitas dapat menjadi pemberi informasi tentang perkembangan pembangunan wilayahnya, termasuk membangun transparansi dana desa yang dikeluarkan untuk pembangunan, dengan begitu dapat terpantau terus oleh masyarakat desa sehingga meminimalisir kecurangan oleh yang bersangkutan. Menurut Nur (2013) radio komunitas menjadi jembatan untuk menghubungkan antara pemangku kepentingan dengan masyarakat lebih luas, hal tersebut bertujuan untuk membuat rencana bagi pembangunan selanjutnya.

Dengan begitu, radio komunitas menjadi akses penting di lingkungan masyarakat untuk membangaun pemberdayaan dan partisipasi dari komunitasnya dengan pengelolaan hingga management yang terus berkembang. Radio komunitas pun dapat berperan aktif sebagai agen pembangunan, mereka menjadi bagian program dan proyek yang memberikan informasi sebagai wadah bagi masyarakat di wilayahnya (Raghunath, 2020).

2. 2. 4. Management Radio Komunitas

Menurut Darmanto et al., (2015) Radio komunitas memiliki ciri yang signifikan daripada radio komersial dan radio milik negara, ciri tersebut terlihat dari kepemilikan dan pemrograman hanya untuk komunitas yang dilayaninya. Menurut Ch et al., (2016) Ciri yang signifikan lebih spesifik pada dua karakteristik, *pertama*, radio komunitas terdapat kepentingan masyarakat yang secara geografis terbatas dan radio publik dengan kepentingan berskala lebih besar dan secara geografis dapat mencakup nasional. *Kedua*, radio komunitas bergantung pada badan hukum yang kepemilikan pendanaan dan pengelolaan harus dilakukan oleh komunitas, berbeda dengan radio publik yang menerima pendanaan dari pejabat negara.

Menurut Nur (2013) bahwa kepemilikan radio komunitas diartikan sebagai bentuk partisipasi dari masyarakat dengan bentuk program, manajemen, direksi dan pembiayaan. Sejalan dengan hal tersebut menurut Ch et al., (2016) bahwa terdapat hal penting dari radio komunitas sebagai pemberi akses yang sama bagi masyarakat untuk mendorong mereka

berpartisipasi aktif dalam manajemen dan produksi. Ada juga kepemilikan yang dikendalikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sehingga struktur, keanggotaan, manajemen, operasi dan pemrograman dikelola oleh anggota komunitas. Menurut Mondy (dalam Morissan, 2018) bahwa manajemen diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, memengaruhi dan pengawasan untuk tercapainya tujuan organisasi melalui koordinasi penggunaan sumber daya manusia dan materi.

Terlepas dari kepemilikan formal, kebijakan, manajemen, dan pemrograman stasiun harus menjadi tanggung jawab masyarakat agar dianggap sebagai radio komunitas yang sebenarnya (Fraser & Estrada, 2001). Sederhananya, radio komunitas dalam kerjanya melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dan pengoperasian stasiun (Ch et al., 2016). Biasanya radio komunitas memiliki komite komunitas yang representatif, atau Dewan Direksi, untuk menetapkan kebijakan secara keseluruhan, sementara radio sehari-hari dengan cepat dan mudah menjadi penghubung antara masyarakat miskin dan kaya, antara kelompok pedesaan dan perkotaan, antara rutinitas pertanian dan kota di waktu luang (Morissan, 2018).

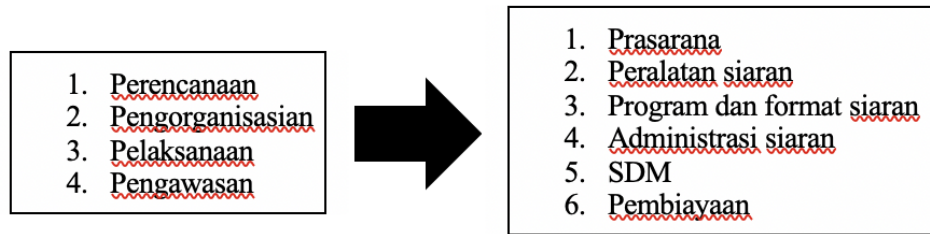
Menurut Darmanto et al., (2015) memberikan definisi bahwa manajemen radio komunitas adalah siaran radio yang diselenggarakan oleh warga komunitas dengan terencana dan terorganisir secara baik, sehingga dapat dilaksanakan dan diawasi agar tujuannya sesuai dengan yang ditetapkan. Dalam proses membangun radio komunitas, manajemen menjadi hal utama untuk keberlangsungan. Komunitas dapat mendukung dengan keterlibatan secara

sukarela karena berlandaskan pemikiran dan visi gagasan yang sama sebelum membahas lebih jauh pada arah teknis seperti studio dan pemancar (Morissan, 2018).

Menurut Yusuf (2016) dalam proses penyiaran radio yang terpenting memiliki transmitter, studio, dan pesawat penerima atau biasa disebut trilogi penyiaran. Studio sebagai tempat untuk melakukan produksi informasi sekaligus menyiarkan dengan ide yang berbentuk pesan baik gambar ataupun suara yang disiarkan melalui transmitter dan diterima oleh pesawat penerima. Dalam pembahasan isi pesan terdapat tiga tahapan pelaksanaan produksi dari mulai praproduksi, produksi hingga pasca produksi.

Pada tahap praproduksi dilakukan penuangan ide dalam bentuk skrip atau naskah yang kemudian dilakukan rapat untuk menyelaraskan persepsi terhadap ide yang siap di produksi bersama anggota lainnya. Pada saat produksi ide dalam bentuk transkrip direalisasikan dengan nyata untuk di berikan kepada khalayak. Tahap pasca produksi hasil dari siaran dapat diputar atau disiarkan kembali.

Pada tahap pengelolaan, terdapat fungsi manajemen radio komunitas yang tidak jauh berbeda dengan radio pada umumnya seperti publik dan swasta. Mulai dari tersedianya studio, pemancar, antena, peralatan teknik, program siaran dukungan SDM hingga pada pendanaan (Morissan, 2018). Bila menurut Darmanto et al., (2015) jika digambarkan dengan Bagan, akan seperti berikut:



Gambar 2. Bagan pengelolaan radio komunitas

Sumber: (Darmanto et al., 2015). Manajemen & Produksi Radio Komunitas

2. 2. 4. 1. Perencanaan (Planning)

Menurut Morissan (2018) perencanaan adalah sebuah tindakan dengan pemilihan sekumpulan kegiatan yang akan dilakukan untuk memutuskan apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa. Darmanto et al., (2015) menjelaskan bahwa perencanaan menjadi awal untuk melihat keberhasilan pada organisasi untuk berjalan kedepannya, setidaknya organisasi paham akan tiga pokok yang harus menjadi perhatian penting pada tahap ini.

Pertama perihal isi, keterlibatan anggota kelompok untuk terlibat dalam tahap perencanaan akan sangat penting karena akan menambah wawasan dan ide-ide dasar untuk menghasilkan kebijakan umum, program kerja dan rencana operasional atau pelaksanaan, karena pembahasan terkait isi sangat penting dan mendasar (Darmanto et al., 2015). Menurut Wibowo (dalam Hasandinata, 2014) isi dalam program siaran yang dibuat oleh pengelola radio komunitas bersifat khas dan tertentu, dengan lingkungan yang terbatas diharapkan

mampu menjawab permasalahan komunitas baik dikemas dengan hiburan, pendidikan dan informasi.

Dalam pembuatan program acara, terdapat dua elemen penting sebagai dasar yaitu “akses dan partisipasi”. Akses berarti setiap anggota komunitas memiliki kesempatan yang sama dalam menerima siaran, sedangkan partisipasi berarti audiens secara aktif terlibat secara manajemen dan produksi siaran komunitas (Ch et al., 2016).

Kedua perihal waktu, setiap organisasi memiliki waktu pertemuan untuk membahas kegiatan kerja dengan jangka waktu pendek, menengah dan panjang. Biasanya untuk jangka waktu pendek 1-6 bulan, jangka waktu menengah 7-12 bulan dan jangka waktu panjang dapat selebihnya. Akan tetapi kembali lagi pada ketentuan setiap organisasi dalam mengatur waktu tersebut karena setiap organisasi berbeda beda dalam menentukan sikapnya sesuai dengan bentuknya (Darmanto et al., 2015).

Kepemilikan dan kontrol radio komunitas menjadi aspek yang paling penting ketika terjadi pertemuan publik yang terbuka. Contoh hal pertemuan tahunan untuk memilih pemimpin di masa yang akan datang dengan dikoordinasikan oleh komite stasiun di sela-sela pembahasan kegiatan sehari-hari yang memastikan pelaksanaan kebijakan radio komunitas berjalan (Khan et al., 2017).

Ketiga perihal tujuan penggunaan perencanaan, pada proses organisasi perencanaan harus memiliki tujuan yang jelas, akan tetapi bila untuk membahas satu kepentingan maka

akan lebih sederhana. Berbeda dengan tujuan untuk menentukan kepentingan yang terus berulang atau dengan rentan waktu yang panjang, harus melibatkan penganalisa sosial untuk membaca dan memperhitungkan kecenderungan perubahan sosial di masa yang akan datang (Darmanto et al., 2015).

Menurut Banze et al., (2012) dalam pembahasan perencanaan staf radio komunitas harus mengidentifikasi audiens yang potensial, memahami bidang kepentingan masyarakat, mengetahui kebutuhan informasi komunitas, mengidentifikasi kekuatan, tantangan, dan aspirasi anggotanya karena stasiun radio mengembangkan potensi para staf untuk bergerak maju.

2. 2. 4. 2. Pengorganisasian (Organizing)

Menurut Darmanto et al., (2015) Untuk menjamin berjalannya organisasi sesuai dengan tujuan awal dibentuknya maka pengorganisasian dapat dijadikan dorongan untuk mencapai keberhasilan. Akan tetapi setidaknya ada lima syarat untuk pengorganisasian berjalan dengan dengan baik. *Pertama*, perumusan tujuan yang jelas, *kedua*, pembagian kerja yang jelas dan teratur, *ketiga* pendelegasian tugas, *keempat*, pengawasan yang bertingkat dan yang terakhir *kelima* adalah koordinasi. Tujuan organisasi adalah pernyataan tentang keadaan yang akan dituju atau diinginkan, yang di mana organisasi tersebut bermaksud untuk mewujudkannya sehingga organisasi sebagai kolektifitas mencoba untuk mewujudkannya (Morissan, 2018).

Menurut Fraser & Estrada (2001) sebuah stasiun radio komunitas dicirikan oleh kepemilikan dan programnya, serta komunitas diberi wewenang untuk menjalankannya. Radio komunitas dapat dimiliki dan dikendalikan oleh organisasi nirlaba yang strukturnya menyediakan keanggotaan, manajemen, operasi dan pemrograman terutama oleh anggota komunitas pada umumnya. Anggota yang ditunjuk untuk mengelola radio komunitas bisa mengisi posisi seperti manajer stasiun, direktur program, atau anggota manajemen senior yang dapat mempertanggung jawabkan atas kelancaran radio komunitas (Banze et al., 2012).

Menurut Fraser & Estrada (2001) bahwa radio komunitas mencoba menjadikan pendengar sebagai aktor utama dalam melakukan semua aspek manajemen dan program produksi sehingga dapat membantu mereka dalam pengembangan dan kemajuannya. Hal serupa disampaikan oleh Khan et al., (2017) bahwa pendengar dijadikan titik fokus radio komunitas sebagai standar utama dalam bentuk pengelolaan, konten dengan bentuk produksi program, dan dengan pemrograman yang dapat membantu mereka dalam pengembangan radio komunitas.

Programnya harus didasarkan pada akses dan partisipasi komunitas dan harus mencerminkan minat dan kebutuhan khusus pendengar yang dilayaninya (Darmanto et al., 2015). Upaya yang dilakukan oleh manajemen radio komunitas semata-mata didasarkan pada semangat untuk memberikan pelayanan berbasis masyarakat (Ch et al., 2016). Dengan begitu pengorganisasian meliputi sebuah proses yang dibentuk dengan struktur organisasi yang sesuai tujuan organisasi dengan didasari oleh SDM dan lingkungannya (Morissan, 2018).

2. 2. 4. 3. Pelaksanaan

Menurut Darmanto et al., (2015) pada tahap pelaksanaan terdapat dua pembahasan yang perlu diperhatikan yaitu personalia (Staffing) dan pengarahan (Directing). Pada radio komunitas, perlu adanya personalia untuk dasar dalam menjalankan siaran, misalnya Dewan Penyiaran Komunitas dan Badan Penyelenggara Penyiaran Komunitas (BPPK) untuk dapat bersinambung agar terpenuhinya ketersediaan personalia. Radio komunitas pun dapat memposisikan pendengar sebagai subjek dalam pengoperasiannya. Pendengar dapat menjadi manajer hingga penyiar, hal tersebut meningkatkan kesadaran manajemen bahwa terdapat dukungan dari masyarakat yang telah terpinggirkan oleh media mainstream (Ch et al., 2016).

Bila diuraikan pada bagian personalia, maka ketersediaan SDM perlu dipenuhi agar tetap bersinambung dalam siaran. Menurut Morissan (2018) bahwa pelaksanaan operasional ialah mereka yang telah ditetapkan untuk menjadi bagian dalam kerja penyiaran. Perlu diperhatikan seperti perencanaan kebutuhan SDM untuk memenuhi posisi sebagai reporter, penyiar, teknisi dan pembantu umum.

Pada tahap perekrutan, radio komunitas sebagian besar mengandalkan sukarelawan, banyak diantaranya tidak memiliki pengalaman dan pelatihan, oleh sebab itu peran manajemen sumber daya manusia sangat penting untuk pengoperasian stasiun yang efektif (Banze et al., 2012). Menurut Darmanto et al., (2015), bagi pengelola radio komunitas, perlu juga memperhatikan tentang kemampuan dan kualitas para sukarelawan yang berpartisipasi

dengan dikembangkannya kemampuan tersebut maka dapat mendukung keberlangsungan siaran.

Adanya perkembangan tersebut akan berdampak pada radio komunitas dan karyawan. Untuk karyawan akan menambahkan motivasi dan moral sehingga berdampak pada organisasi yang memiliki sumber daya manusia cakap dan mahir (Morissan, 2018). Walaupun dengan bentuk sukarelawan, anggota komunitas harus dan dapat terlibat dalam radio komunitas dengan konsekuensi tanpa adanya insentif apapun berupa gaji atau upah bagi pengelola dan penyiar (Ch et al., 2016).

Perlu disadari bahwa pengarahan di radio komunitas berbeda dengan pengarahan yang terjadi pada industri lainnya. Pengarahan di radio komunitas dimaknai sebagai proses menggerakkan seluruh daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada proses pembentukan (Darmanto et al., 2015). Hal ini diartikan sebagai bentuk untuk memandu dan mendukung pengoperasian stasiun radio komunitas (Banze et al., 2012).

Menurut Darmanto et al., (2015) Pada pembahasan tentang pengarahan, maka dapat dilakukan oleh jajaran pimpinan seperti pimpinan umum, siaran dan teknik. Hal tersebut tidak terlepas dari komunikasi yang baik antar anggota tim dan idealnya komunikasi tersebut berbentuk saling menghargai yang berbeda pendapat, mendorong keterbukaan, berbagi pengetahuan dan pengalaman diantara mereka. Pada akhirnya dalam melakukan pengarahan

oleh pimpinan, diharapkan dapat merealisasikan pencapaian tujuan sehingga perlu adanya indikator atau nilai yang jelas dalam mengukur seberapa jauh tingkat merealisasikan tujuan tersebut tercapai (Morissan, 2018).

Pada prinsipnya pengarahan dilakukan dengan tujuan harus jelas dan tidak memiliki penafsiran ganda sehingga tidak dianggap sebagai “perintah”. Jika pesan/tugas tersebut lebih dari satu, berikanlah secara berkala satu persatu sehingga yang menerima tugas tidak merasa keberatan (Darmanto et al., 2015). Dengan pemberian tugas itupun, sebaiknya pemimpin tidak menjadi sewenang-wenang, tetap berlandaskan komunikasi yang baik dengan tetap memahami sifat sosial-budaya di masyarakat. Menurut Banze et al., (2012) bahwa pimpinan yang baik perlu melihat cara mengelola antara orang-orang yang bekerja di stasiun serta antar di stasiun dengan masyarakat.

Komunikasi antara pimpinan dan karyawan menjadi faktor penting untuk melaksanakan fungsi dari manajemen yang lebih efektif (Morissan, 2018). Bagi seorang anggota, pemberian tugas dapat diterima asalkan masuk akal dan diterima secara nalar, Agar dalam pemberian tugas kerja tidak menjadi hambatan untuk terlaksananya tugas dengan baik. Pentingnya pemberian tugas secara profesional dan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki anggota tersebut, misalkan penyiar yang tiba-tiba dipaksakan mendapat tugas untuk menyelesaikan permasalahan teknis atau bagian administrasi yang tidak sesuai dengan latar belakangnya (Darmanto et al., 2015).

2. 2. 4. 4. Pengawasan (Controlling)

Menurut Morissan (2018), pengawasan merupakan proses untuk mengetahui hasil dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya apakah telah berhasil atau belum. Pada tahap pengawasan atau kontrol harus memperhatikan bagian yang terpenting pada tubuh organisasi agar terjaminnya pencapaian tujuan yang sudah dirumuskan di awal perencanaan. Bagian terpenting tersebut antara lain seperti perencanaan, biaya, sarana dan prasarana, SDM, Metode dan aturan main organisasi dan hasil kegiatan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan identifikasi pengawasan dengan rentan waktu harian, mingguan, bulanan, atau setiap tahun dengan tingkatan kontrol otomatis, kontrol hirarki, audit, inspeksi internal maupun eksternal (Banze et al., 2012).

Pengawasan tersebut dapat dilakukan oleh seluruh anggota komunitas dengan tujuan menemukan potensi untuk suatu kelebihan yang perlu dikembangkan, dipertahankan dan bila memiliki kelemahan maka cara memperbaikinya dengan bersama-sama, agar tetap memiliki keberlangsungan hidup di radio komunitas tersebut (Darmanto et al., 2015). Terlepas dari hal tersebut masyarakat umum diberikan ruang untuk ikut berpartisipasi.

Menurut Banze et al., (2012) bahwa pengawasan yang melibatkan masyarakat merupakan aspek dari partisipatif karena dapat membangun investasi dari masyarakat. Adapun sumber daya manusia yang perlu diawasi untuk tetap menjaga kualitas kinerja organisasi. Pengawasan dilakukan untuk membuat para pekerja tidak membuat aturan sendiri

dalam melakukan pekerjaannya walaupun sukarelawan. Kreatifitas dalam komunikasi antar anggota perlu dilakukan untuk menjauhi ketersinggungan ketika melakukan pengawasan terhadap SDM.

Menurut Darmanto et al., (2015) Bila dijabarkan pada bagian terpenting seperti perencanaan, maka pengawasan dapat dilihat dari kebijakan umum yang diberlakukan organisasi tersebut, kemudian pada agenda kegiatan yang sudah berjalan harus diawasi dengan memegang prinsip pada perencanaan di awal. Proses pengawasan dan evaluasi menentukan sudah seberapa jauh proses rencana dan tujuan tercapai atau diwujudkan oleh stasiun penyiaran (Morissan, 2018).

Secara umum pembahasan biaya di sebuah organisasi menjadi sangat sensitif untuk dibicarakan. Untuk itu, pengawasan dalam pengelolaan anggaran harus berpedoman pada total pemasukan dan pengeluaran dana dengan berpatok pada anggaran yang disediakan di tahun bersangkutan, sehingga menghindari terjadinya penyimpangan anggaran dan membuat hancurnya keharmonisan suatu organisasi (Darmanto et al., 2015). Perlu adanya metode dan aturan main di dalam organisasi demi kepentingan bersama dengan tujuan untuk lebih baik. Pengawasan menjadi sangat penting dilakukan atas dasar hasil kerja atau kinerja yang dapat diukur, untuk mendapatkan cara kerja yang lebih efektif dan teratur (Morissan, 2018).

Pada kasus Hanacaraka FM, dalam proses pra produksi para pengelola mulai dari direktur program hingga penyiar melakukan rapat bersama untuk membahas topik/ILM yang

diangkat. Rapat tersebut menghasilkan ide yang di mana telah disepakati bersama untuk kemudian dilanjutkan proses produksi. Dalam produksi ILM yang memerlukan lakon untuk mengisi suara, para pengelola menunjuk anggota komunitas ataupun masyarakat sekitar yang suaranya cocok untuk memerankan lakon tersebut. Perekaman suara dilakukan di studio yang kemudian masuk pada proses editing yang siap disiarkan. Pada pasca produksi, isi siaran yang telah dibuat didengarkan kembali dan mencari respon para pendengarnya untuk dilakukan evaluasi.